BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Pajak mengacu pada kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh perusahaan dan individu kepada pemerintah sesuai ketentuan hukum pajak yang berlaku (Fajrina, 2023). Di tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi Undang-Undang (UU). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang merupakan revisi Undang-Undang Perpajakan. Tarif PPN sebelumnya 10% resmi naik menjadi 11%. Naiknya tarif tersebut diputuskan secara bertahap, yaitu berlaku mulai tanggal 1 April 2022 tarif naik menjadi 11%. Menurut UU HPP Pasal 7 ayat (2) tarif PPN 12% mulai diterapkan selambatnya tanggal 1 Januari 2025.

Dilansir dari Jakarta, CNBC Indonesia, Komisi XI DPR RI menyetujui rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saat ini ditetapkan sebesar 10%. Kenaikan PPN ini akan dilakukan secara bertahap mulai tahun depan. Artinya, dengan kenaikan PPN ini maka mulai tahun depan barang yang dikonsumsi masyarakat berpotensi akan mengalami kenaikan harga.

Berdasarkan draft RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (nama baru RUU KUP) yang diterima CNBC Indonesia, Kamis (30/9/2021), dalam

Bab IV Pasal 7 dijelaskan secara rinci tarif PPN terbaru. Untuk tahun 2022, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai menaikkan tarif PPN menjadi 11%. Ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.

Tarif PPN sebesar 11% ini akan berlaku sekitar dua tahun dan kemudian dinaikkan lagi menjadi 12%. Kenaikan PPN menjadi 12% ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Tujuan adanya kenaikan tarif PPN menjadi 11% yaitu untuk memaksimalkan penerimaan negara serta untuk membangun fondasi perpajakan yang lebih kuat.

Dikutip Jakarta, DDTCNews – Kementerian Keuangan menilai dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% pada tahun ini sudah sesuai dengan yang diperkirakan.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Aرسال mengatakan efek kenaikan tarif PPN misalnya tercermin dari tambahan penerimaan negara. Sejak berlaku pada April 2022 hingga 14 Desember 2022, kenaikan tarif PPN telah memberikan tambahan penerimaan senilai Rp 53,57 triliun.

Penjualan atas barang dan jasa yang dibebankan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atau dikenal dengan BKP (Barang Kena Pajak), dan juga barang yang dibebaskan dari PPN mengacu pada ketentuan yang diatur pada PP No. 49 Tahun 2022. Pengenaan barang dan layanan tertentu dari luar wilayah pabean, beserta penggunaan layanan tertentu tersebut, dikecualikan

dari penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah menurut peraturan yang diberlakukan.

“Pajak adalah kewajiban bayar pada pemerintah yang perlu dicapai pemenuhannya oleh individu atau entitas, tanpa mendapat imbalan langsung. Fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan”, *UU No. 28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Menurut kriteria ini, terlihat bahwasanya sistem pemungutan pajak di Indonesia relatif kuat namun tidak terlalu membebani. Indonesia menerapkan berbagai jenis pajak, satu diantaranya yakni PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

“PPN adalah jenis pajak yang dibebankan pada pembelian produk dan jasa di dalam wilayah pabean suatu negara. Pajak ini berlaku untuk BKP (Barang Kena Pajak) dan JKP (Jasa Kena Pajak)” (Supramono, 2009:125). Di bahasa Inggris, istilah "PPN" mengacu pada VAT (*Value Added Tax*) ataupun GST (*Goods and Services Tax*). PPN merujuk pada jenis pajak tak langsung di mana kewajiban pembayaran pajak berada pada pihak selain pengguna akhir. Artinya, pengguna akhir tidak membayar pajak secara langsung, tetapi pajak dibayarkan oleh pemasok atau pedagang.

PPN (Pajak Pertambahan Nilai) termasuk kewajiban pajak yang dibebankan terhadap berbagai kegiatan ekonomi, seperti penjualan BKP (Barang Kena Pajak) oleh pengusaha di wilayah pabean, pemberian Jasa Kena Pajak oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) di wilayah pabean, impor

BKP, penggunaan BKP di luar wilayah pabean yang dimasukkan kembali ke dalam wilayah pabean, penggunaan Jasa Kena Pajak di luar wilayah pabean oleh PKP, ekspor BKP oleh PKP, dan ekspor Jasa Kena Pajak oleh PKP. PPN merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah terkait seluruh transaksi jual beli jasa dan barang yang dijalankan oleh individu atau entitas yang sudah didaftarkan menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak).

Ruang lingkup Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu mencakup:

1. Mengalihkan barang-barang kebutuhan primer, layanan pendidikan, serta layanan kesehatan dari kelompok barang dan layanan yang tidak terkena PPN ke dalam kategori yang dibebaskan dari PPN. Tujuannya adalah untuk mengamankan masyarakat dengan penghasilan menengah dan rendah dari lonjakan harga yang mungkin timbul akibat perubahan pada UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Merubah pembebasan dan fasilitas PPN untuk lebih sejalan dengan prinsip pemerataan dan efektivitas dalam mencapai tujuan.
3. Tarif PPN akan naik dari 10% jadi 11% sejak tanggal 1 April 2022, dan kemudian meningkat lagi jadi 12% selambatnya tanggal 1 Januari 2025.
4. Menyediakan kemudahan dan kejelasan dalam penerapan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dengan menetapkan tarif yang pasti untuk Barang atau Jasa Kena Pajak tertentu.

“Pajak penghasilan merupakan pembayaran yang dipungut dari individu atau entitas berdasarkan pendapatan yang diperoleh atau dihasilkan dalam satu tahun pajak tertentu”, Pasal 1 *UU PPh No. 7 Tahun 1983*.

Menurut Resmi (2011), pajak penghasilan merupakan pembayaran yang ditetapkan untuk individu ataupun badan atas pendapatan yang diperoleh atau dihasilkan dalam periode fiskal tertentu. Pendapatan tersebut dapat berupa honorarium, gaji, hadiah, bunga, keuntungan bisnis, dividen, royalti, dan jenis sumber pendapatan lainnya.

Menurut Mardiasmo (2018:60), “Pajak Penghasilan mengacu pada pembayaran yang dibebankan terhadap individu, badan hukum, atau entitas hukum lainnya sesuai dengan pendapatan yang mereka peroleh.” Landasan hukum untuk pajak penghasilan ditetapkan melalui UU No. 7 Tahun 1983, yang selanjutnya mengalami serangkaian perubahan. Perubahan dimulai dengan UU No. 7 Tahun 1991, kemudian diikuti oleh UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, dan yang terakhir UU No. 36 Tahun 2008.

Ruang lingkup Pajak Penghasilan (PPh) yaitu mencakup:

1. Pemberian kenikmatan dan/atau natura terhadap karyawan dapat ditanggung oleh pemberi kerja dan dianggap sebagai penghasilan bagi karyawan.
2. Batas omzet bruto yang tidak dikenakan pajak bagi pemilik usaha adalah hingga lima ratus juta rupiah.

3. Tarif Pajak Penghasilan Badan dinaikkan menjadi 22% mulai tahun pajak 2022.

Setelah wacana yang berlangsung dalam kurun waktu tahunan, pemerintah Indonesia akhirnya melaksanakan reformasi pajak dengan mengurangi tarif Pajak Penghasilan Badan dari 25% menjadi 22% pada tahun 2022. Tarif PPh Badan juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 40 Tahun 2023 Pasal 2 tentang Tarif pajak penghasilan yang berlaku atas penghasilan kena pajak wajib pajak badan nasional dan bentuk usaha tetap adalah:

- a. 22% (dua puluh dua persen) yang diberlakukan di tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan
- b. 22% (dua puluh dua persen) yang mulai diberlakukan di Tahun Pajak 2022, mengacu pada ketentuan UU No. 7 Tahun 2021 terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Alasan pemerintah mengurangi tarif PPh badan dikarenakan sebelumnya tarif dengan besaran 25% dinilai kurang maksimal. Disamping itu tujuannya juga untuk mendorong roda ekonomi serta mendorong dunia usaha agar bisa secara konsisten melangsungkan usaha untuk menyelesaikan situasi krisis.

Selain itu juga perlu dipertimbangkan kembali urgensi keputusan penurunan pajak penghasilan badan. Karena pada dasarnya pajak memegang peranan penting dalam pembangunan negara, karena biaya yang harus

dikeluarkan untuk pembangunan berasal dari pajak. Dengan kata lain, tanpa pajak negara tidak dapat mencapai tujuan pembangunannya secara optimal. Ketika pemerintah menurunkan tarif pajak perusahaan, hal ini berdampak langsung terhadap pendapatan negara.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ragilia & Danny (Larasati & Wibowo, 2022) dalam penelitiannya berjudul “*Implementasi Kenaikan Tarif PPN Pasca UU No 7 Tahun 2021 Pada Pengusaha Kena Pajak Di Surabaya*”. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kenaikan pada PPN 11% menyebabkan harga jual menjadi naik. Dari hasil wawancara juga disebutkan bahwasanya daya beli masyarakat berkurang terkait dengan kenaikan harga ekonomi yang disebabkan karena kenaikan tarif PPN 11% tersebut.

Penelitian oleh Karina & Widodo (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “*Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. ABC Sebelum dan Setelah Diterapkannya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021*”. Dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa naiknya tarif PPN dengan besaran 11% tersebut menimbulkan berkurangnya penjualan yang sangat besar, dikarenakan daya beli konsumen yang berkurang. Kesamaan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu kenaikan PPN sebesar 11% menyebabkan penurunan penjualan karena daya beli masyarakat menurun.

CV XXX berdiri pada tahun 2021. CV ini bergerak di bidang penjualan dan distribusi pakan hewan ternak yang berlokasi di Jombang. CV XXX sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak Januari 2024. Hal ini membuat CV XXX memiliki kewajiban untuk memungut PPN dan menyetorkan PPh Badan.

Sebelumnya CV XXX belum menerapkan kebijakan UU HPP No. 7 Tahun 2021 dikarenakan wajib pajak belum bisa mengaplikasikan kebijakan tersebut dan belum menguasai akan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Namun seiring dengan berjalannya waktu, CV XXX pada tahun 2023 lalu sudah mulai menerapkan aturan perpajakan seperti UU HPP No. 7 Tahun 2021 ini. Ditandai dengan pemungutan PPN dan pelaporan SPT Tahunan Badan CV XXX. Hal ini menjadikan CV XXX sudah menjalankan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan fenomena yang terjadi tersebut, penulis memiliki ketertarikan untuk melaksanakan penelitian dengan judul **Analisis Dampak Pajak Pertambahan Nilai 11% Dan Pajak Penghasilan Badan 22% Setelah Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Di CV XXX.**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, maka fokus peneliti terhadap penelitian ini yaitu apa dampak implementasi Pajak

Pertambahan Nilai 11% dan Pajak Penghasilan Badan 22% di CV XXX sesuai dengan UU HPP No 7 tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dampak implementasi Pajak Pertambahan Nilai 11% dan Pajak Penghasilan Badan 22% di CV XXX.

1.4 Manfaat Penelitian

Harapannya penelitian ini akan menghasilkan manfaat yang bermakna setelah selesai, dengan memberikan kontribusi yang mencakup :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Harapannya penelitian ini akan membantu pemahaman dan penerapan mengenai PPN dan PPh Badan setelah pemberlakuan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021. Diharapkan pula supaya penelitian ini dapat membantu memperkuat pemahaman terkait pengaruh penagihan pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Melalui dilakukannya penelitian ini, harapannya bisa bermanfaat untuk menambahkan pengetahuan, pengalaman, serta wawasan bagi peneliti terkait dengan Implementasi PPN dan PPh Badan setelah Penerapan UU HPP No.7 Tahun 2021 di CV XXX.

b. Bagi STIE Dewantara Jombang

Diharapkan pada penelitian ini dijadikan sebagai sarana guna menambah wawasan dan dapat memberi informasi serta pedoman sekaligus referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya bagi peneliti lain.

c. Bagi Perusahaan

Peneliti berharap supaya penelitian ini dapat membantu CV XXX untuk mengimplementasikan PPN 11% dan PPh Badan 22% serta diharapkan dapat meningkatkan citra perusahaan.